

**PENGARUH TINGKAT INKLUSI KEUANGAN,
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT),
DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN PENANAMAN
MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TERHADAP
TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI 33
PROVINSI INDONESIA PERIODE 2011-2016**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh:

**Graceilla Kristia Sheraphim
145020400111010**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

**PENGARUH TINGKAT INKLUSI KEUANGAN, TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA (TPT), DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TERHADAP TINGKAT
PERTUMBUHAN EKONOMI DI 33 PROVINSI INDONESIA PERIODE
2011-2016**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email: graceillas95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat inklusifitas keuangan pada 33 provinsi di Indonesia dan mengetahui pengaruh Tingkat Inklusi Keuangan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi Indonesia periode 2011-2016. Metode yang digunakan adalah Index Financial Inclusion (IFI) dan Analisis Regresi Linear. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat inklusi keuangan pada 33 Provinsi Indonesia memiliki trend meningkat dan tergolong dalam high financial inclusion. Kemudian hasil Analisis regresi menemukan Tingkat Inklusi Keuangan, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi pada periode tahun tertentu secara signifikan positif juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: *Inklusi Keuangan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dana Pihak Ketiga, Penanaman Modal dalam Negeri, Pertumbuhan ekonomi.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki sistem perekonomian cukup baik, bahkan menurut overview yang diterbitkan oleh World Bank (2015) Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-10 dalam paritas daya beli dan anggota dari G-20. Hal ini dapat tercermin dari tingkat pendapatan per kapita yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun cenderung berfluktuatif, pada tahun 2011 Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi mencapai 6.5% yang merupakan tingkat pencapaian tertinggi selama sepuluh tahun terakhir. Peningkatan ini mengindikasikan peningkatan pembangunan yang salah satunya tercermin dalam sistem keuangan yang stabil dan kuat serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Lembaga keuangan formal maupun non-formal diharapkan dapat memainkan perannya secara aktif dalam peran intermediasinya guna mencapai pemerataan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi serta dalam pencapaian stabilitas sistem keuangan. Namun, kemajuan teknologi dalam institusi keuangan dalam realisasinya belum diimbangi dengan fasilitas akses keuangan yang memadai bagi seluruh masyarakat, hal ini mendasari munculnya kelompok *unbanked people*. Menurut Umar (2017) dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, besarnya kesempatan masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap jasa keuangan dan perbankan mencerminkan tingkat keuangan inklusif dalam perekonomian tersebut. Lebih lanjut, Umar juga mengatakan bahwa Indonesia masih termasuk dalam negara dengan tingkat *financial exclusion* yang masih cukup tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dengan data yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam survei neraca rumah tangga (2011) menunjukkan bahwa hanya sekitar 48% persentase rumah tangga yang menabung pada lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan. Hal serupa juga ditemukan oleh *World Bank* (2014) yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 38% (usia diatas 15 tahun) masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap institusi keuangan formal. Menurut Bank Indonesia (2004) *unbanked people* ini umumnya muncul dikarenakan adanya hambatan yang datang dari sisi penyedia jasa layanan perbankan (*supply*) dan juga masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan (*demand*), diantaranya karena *price barrier* yang berarti harga produk yang ditawarkan oleh perbankan belum dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, selain itu

terbatasnya informasi atau *information barrier*, desain produk yang cocok atau *design product barrier* dan juga sarana yang sesuai atau *channel barrier*. Untuk mengatasi berbagai penyebab rendahnya akses keuangan masyarakat maka munculah program perluasan akses keuangan yang umumnya disebut dengan inklusi keuangan, yakni merupakan sebuah proses untuk menjamin kemudahan dan terbukanya akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian (Sarma, 2008). Dalam *ASEAN Summit 2011* pemerintah Indonesia melalui Presiden RI menyampaikan komitmennya dalam *Chairman Statement* untuk memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Selanjutnya, pada tanggal 1 September 2016 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Inklusi keuangan sendiri dapat diukur menggunakan Index Financial Inclusion (Sarma, 2012) menggunakan 3 dimensi yakni aksesibilitas, availibilitas dan penggunaan jasa keuangan, sehingga dapat diketahui mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan dalam suatu wilayah dan sejauh mana kebijakan pemerintah melalui program inklusi keuangan berhasil dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adanya upaya perbaikan dan peningkatan fasilitas dalam akses masyarakat terhadap jasa keuangan yang dapat diindikasikan dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi agregat yang cepat dan memitigasi segala permasalahan pokok seperti ketimpangan dan kemiskinan melalui kredit murah sehingga alokasi modal menjadi efisien dan merata.

Pada hakekatnya semua negara di dunia berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya yang tercermin dalam tingkat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai upaya pembangunan ekonomi. menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun juga dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan, sementara untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun pada 33 provinsi Indonesia digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi segala hal yang menunjang seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibutuhkan menjadi hal yang penting, terutama memberikan perhatian khusus terhadap dana yang dibutuhkan harus mencukupi guna mencapai pembangunan yang optimal. Dana ini merupakan dana investasi. Hal ini sejalan dengan Sutawijaya (2010) yang menyatakan bahwa investasi yang meningkat akan meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara laju pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat merupakan suatu fenomena yang dapat memberikan dampak buruk terhadap perekonomian maupun kehidupan sosial suatu negara, termasuk Indonesia. Ketika penduduk mengalami peningkatan maka kompetisi dalam lapangan kerja semakin ketat karena pertumbuhan jumlah penduduk akan meningkatkan kompetisi dalam memperebutkan pekerjaan. Ketika penawaran lebih banyak dibandingkan permintaan akan tenaga kerja menjadikan masyarakat menjadi pengangguran. Semakin pentingnya inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan kajian yang membahas mengenai inklusifitas keuangan, topik ini seyogyanya menjadi topik yang sangat penting dan menarik untuk dikaji.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dasar Inklusi Keuangan

Menurut Bank Indonesia, eksistensi istilah inklusi keuangan atau *financial inclusion* dimulai pasca terjadinya krisis pada tahun 2008 silam, didasari dari dampak krisis terhadap kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal didaerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya merupakan kelompok *unbanked people* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Selanjutnya, Leyshon dan Thrift (1995) dalam Sanjaya dan Nursechafia (2016) yang mendefinisikan inklusi keuangan sebagai *antithesis* dari eksklusi keuangan. National Australian Bank Report (2011) dalam Sanjaya dan Nursechafia (2016) mendefinisikan *financial exclusion* sebagai keadaan dimana individu tidak dapat mengakses layanan keuangan beserta produk-produk yang ditawarkan misalnya produk yang tepat dan terjangkau. Menurut Bank Indonesia, inklusi keuangan mampu menjawab segala alasan yang menyebabkan masyarakat menjadi *unbanked*. Sarma (2008) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam mendapatkan akses, ketersediaan, dan mendapatkan manfaat dari adanya institusi keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat yang juga merupakan pelaku ekonomi.

Indikator Keuangan Inklusif/ *Index Financial Inclusion (IFI)*

Sarma (2012) mengembangkan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat inklusi keuangan yang dimiliki antar negara maupun antar provinsi dalam sebuah negara dengan periode waktu tertentu. Metode ini diberi nama *Index Financial Inclusion* (IFI). IFI memenuhi asumsi komparabilitas, properti matematika dan tiga dimensi yakni dimensi aksesibilitas (*penetration*) atau penetrasi perbankan, dimensi availibilitas (*availability*) dan dimensi penggunaan jasa perbankan (*usage of banking services*). Untuk indikator yang digunakan oleh masing-masing dimensi diantaranya: a) aksesibilitas: jumlah akun rekening perbankan per 100.000 penduduk dewasa, b) availibilitas: jumlah kantor cabang bank per 100.000 penduduk, c) penggunaan jasa keuangan: jumlah kredit bank per PDB. Interpretasi dari nilai yang dihasilkan adalah nilai IFI suatu daerah rendah dapat ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan masyarakat kelas menengah, sedangkan IFI yang tinggi dapat ditunjukkan oleh negara-negara maju yang cenderung berpendapatan tinggi pula.

Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hakekatnya, inklusi keuangan merupakan strategi pembangunan nasional yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Menurut Bank Indonesia, Keuangan inklusif merupakan suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) dimana seluruh masyarakat dapat memanfaatkan berbagai produk dan layanan jasa keuangan formal seperti sarana penyimpanan uang yang aman (*keeping*), layanan transfer antar rekening, layanan pembiayaan dan layanan peminjaman hingga berbagai layanan asuransi yang disediakan oleh lembaga keuangan formal sebagai upaya dalam penyediaan berbagai layanan atau produk dengan cara yang sesuai juga tentunya dikombinasikan dengan berbagai aspek dalam kehidupan. Sehingga pada akhirnya berdampak pada produktifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan berkelanjutan.

Konsep dan Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menganalisis pembangunan dalam suatu negara. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah masih digunakan sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian suatu negara selain itu juga dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan nasional. PDRB atas dasar harga konstan, menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, nilai ini berfungsi untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Terdapat beberapa teori mengenai pertumbuhan seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik.

Teori pertumbuhan ekonomi ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan Malthus. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh 4 faktor, yakni: jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini menekankan pada jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dan berasumsi bahwa luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak berubah. Teori ini menjelaskan bahwa penambahan jumlah penduduk akan meningkatkan pendapatan perkapita (teori penduduk optimal). Namun pertumbuhan penduduk yang terus-menerus akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan dan selanjutnya keadaan pendapatan perkapita akan sama dengan produksi marginal. Ringkasnya, penambahan penduduk yang melebihi titik optimal akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

- Teori Rostow dan Teori Harrod-Domar

Teori Rostow mengenai pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. Teori yang dikemukakan oleh Rostow ini diperjelas dengan teori Harrod-Domar, teori yang dikembangkan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Kedua ekonom hampir mengembangkan teori ini dalam waktu yang bersamaan, dengan perhitungan yang berbeda namun memberikan hasil yang sama. Teori ini sebenarnya dikembangkan untuk melengkapi teori Keynes. Perbedaannya, teori yang dikembangkan oleh Keynes melihat jangka pendek (statis) sementara teori Harrod-Domar melihat dalam kondisi jangka panjang (dinamis). Dalam teori ini dijelaskan bahwa semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah *capital stock* sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Harrod-Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang dimana seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar hanya dapat terpenuhi ketika tercapai keseimbangan:

$$g = K = n$$

ket: g = Growth (pertumbuhan output/pertumbuhan ekonomi)
K = Capital (tingkat pertumbuhan modal)
n = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Akhir dari teorinya disimpulkan bahwa pemerintah sangat perlu untuk menyusun rancangan investasi agar dapat mencapai titik kesimbangan antara sisi penawaran dan permintaan barang. Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa tingkat tabungan dan *capital stock* yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun Todaro (2006) melakukan penelitian dengan memberikan hasil yang berbeda antara pertumbuhan ekonomi di Eropa Timur dan di Afrika. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, misalnya kualitas SDM dan infrastruktur pendukung yang ada pada negara tersebut.

- Teori pertumbuhan Neo-Klasik

Teori ini dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T. W. Swan (1956). Model ini menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi. Teori ini menggunakan model fungsi produksi yang dapat mensubstitusi capital (K) dan tenaga kerja (L). Penggunaan model fungsi ini menyebabkan model Solow-Swan kurang restriktif karena terdapat kemungkinan bahwa modal dapat disubstitusi dengan tenaga kerja yang berarti juga terdapat fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja. Dalam teori ini dikatakan peran pemerintah hanya sebatas pembuat kebijakan baik fiscal maupun moneter. Sebagai penerus teori pertumbuhan klasik, teori ini menganjurkan agar menuju kondisi pasar sempurna sehingga perekonomian akan tumbuh maksimal. Penerus paham neoklasik menunjukkan bahwa untuk menciptakan pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), diperlukan *saving* yang tinggi dan juga seluruh laba pengusaha diinvestasikan kembali kepada proses produksi.

- Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynesian

Teori ini pada dasarnya menekankan pada perekonomian campuran dimana baik pemerintah (negara) maupun sektor swasta memegang peranan penting, sektor swasta dan pasar tidak dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah karena pada dasarnya sektor tersebut berorientasi pada profit. Teori ini mengatakan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh seseorang merupakan pendapatan bagi orang lain pada suatu perekonomian yang sama, siklus ini berlanjut dan menjadikan perekonomian berjalan normal. Namun ketika Great Depression, orang akan lebih suka menimbun uang sehingga menghentikan siklus perputaran uang dan perekonomian menjadi lumpuh. Keynes memberikan solusi untuk hambatan dan untuk meningkatkan perekonomian secara umum adalah dengan campur tangan otoritas atau pemerintah sebagai pengatur maupun pengendali perekonomian, misalnya dalam peningkatan belanja masyarakat, perumusan program-program, suplai uang atau melakukan transaksi terhadap pasar barang dan jasa. Pada intinya teori ini mendukung pendistribusian kekayaan secara merata. Hal ini karena ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran, yakni ketika masyarakat miskin diberi sejumlah uang, maka mereka akan cenderung membelanjakannya dibanding menyimpannya, kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Teori Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam buku yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money*, J. M. Keynes menjelaskan gambaran mengenai teori umum keadaan kesempatan kerja, baik pada kondisi masa *full employment* maupun untuk *under-employment*. Dalam buku tersebut dijelaskan pula mengenai tujuan keberadaan kebijaksanaan ekonomi adalah dimaksudkan untuk mengatasi masalah pengangguran. Keynes menjelaskan kondisi pengangguran terjadi ketika orang-orang masih tetap ingin melakukan kegiatan produktifitas atau bekerja namun terhambat oleh beberapa hal sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan yang diharapkan. Kondisi ini misalnya terjadi ketika pasar mengalami kelesuan sehingga keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan juga ikut merosot, hal ini dalam jangka panjang akan berpotensi menimbulkan kerugian atau lebih parahnya perusahaan terkait dapat mengalami kebangkrutan, sebagai tindakan selanjutnya umumnya perusahaan akan berusaha untuk menekan biaya produksi dalam komposisi upah karyawan, dengan kata lain perusahaan akan melakukan pemecatan masal terhadap buruh atau pekerja didalamnya sehingga menyebabkan pengangguran yang tidak dikehendaki atau tidak disengaja (*involuntary unemployment*). Lebih lanjut, Keynes menjelaskan *involuntary unemployment* merupakan akibat dari depresiasi yang terjadi di negara-negara kapitalis. Hakekatnya pertumbuhan ekonomi dimaksudkan untuk memmeratakan dan memaksimalkan tingkat kemakmuran bagi seluruh masyarakat, fenomena pengangguran dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut dikarenakan

pendapatan riil masyarakat lebih rendah dari pendapatan potensial yang seharusnya dapat mereka dapatkan, penurunan pendapatan negara melalui sektor pajak dan turunnya daya beli masyarakat.

Teori Tabungan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

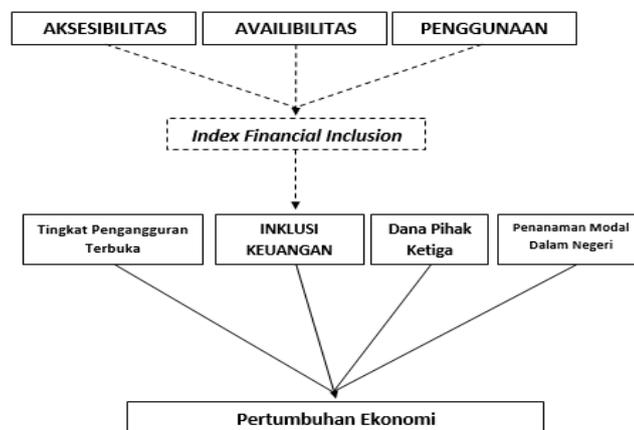
Teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Harrod-Domar, merujuk pada perekonomian dalam negara-negara maju. Dalam teori tersebut dikatakan bahwa jumlah tabungan yang terus ditingkatkan dan nilai dari ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) yang semakin diperkecil akan mendukung suatu negara untuk tumbuh dengan cepat. Teori tentang tabungan pada umumnya didasarkan pada dua aliran, yang pertama dari aliran klasik dan yang kedua dari aliran Keynesian. Penganut aliran klasik menyatakan bahwa tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga dengan hubungan positif, salah satu penganut kubu ini adalah Wicksell. Sementara Keynes (1936) menyatakan bahwa tabungan merupakan fungsi dari tingkat pendapatan dan kubu Keynesian memberikan beberapa hipotesis tentang tabungan yang berhubungan dengan konsumsi. Misalnya hipotesis pendapatan permanen yang dikemukakan oleh Friedman (1957) dimana pendapatan permanen dan pendapatan transitory dibedakan berdasarkan penentu tabungannya.

Teori Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, diantaranya akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Harrod-Domar menyatakan sebuah teori pertumbuhan ekonomi yang merupakan teori perkembangan langsung dari teori ekonomi makro Keynes dengan jangka pendek yang kemudian menjadi jangka panjang. Menurut teori ini, investasi memberikan pengaruh ganda dalam jangka panjang, yakni mempengaruhi permintaan agregat dan kapasitas produksi nasional dengan penambahan stok modal. Harrod menyatakan *required growth = required savings ratio* dibagi oleh *required capital output ratio*. Sedangkan Domar membuat permodelan dimana ekuilibrium dalam pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan pertumbuhan investasi dalam perkembangan waktu (Arsyad, 2010).

C. KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

Gambar 1 Kerangka Pikir



Sumber: Penulis, 2018.

Adapun hipotesis berdasarkan kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2: Diduga terdapat pengaruh positif antara tingkat inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H2: Diduga terdapat pengaruh negatif antara tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi.

H3: Diduga terdapat pengaruh positif antara dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan ekonomi.

H4: Diduga terdapat pengaruh positif antara penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi.

D. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu merupakan penelitian yang menggunakan data-data numerikal dan kemudian diolah dengan menggunakan bantuan alat metode statistika (Azwar, 2007: 5). Subana dan Sudrajat (2005) menjelaskan bahwa jenis

kuantitatif juga dapat dilihat dari segi tujuan dari penelitian yang digunakan, yakni diantaranya digunakan untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan digunakan juga untuk menunjukkan hubungan antar variabel dalam penelitian serta adapula yang sifatnya untuk mengembangkan sebuah konsep, mengembangkan pemahaman atau mendiskripsikan banyak hal. Alat metode statistika yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Microsoft Excel 2013* dan *Eviews 9.0*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini diantaranya:

i. Analisis pengukuran tingkat inklusifitas keuangan pada 33 Provinsi Indonesia

No	VARIABEL	INDIKATOR
1	Aksesibilitas (D ₁)	Rasio jumlah akun pada perbankan Umum per 100.000 penduduk, dihitung dengan rumus: $D_1 = \frac{\text{Jumlah nasabah Bank umum (tahun}_t\text{)}}{\text{Jumlah Penduduk (tahun}_t\text{)}} \times 100.000$
2	Availibilitas (D ₂)	Rasio jumlah kantor layanan bank umum per 100.000 penduduk, dihitung dengan rumus: $D_2 = \frac{\text{Jumlah kantor (tahun}_t\text{)}}{\text{Jumlah Penduduk (tahun}_t\text{)}} \times 100.000$
3	Penggunaan jasa perbankan (D ₃)	Rasio jumlah kredit umum yang diberikan oleh bank umum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam milyar rupiah, dihitung dengan rumus: $D_3 = \frac{\text{Jumlah kredit umum (tahun}_t\text{)}}{\text{Nilai PDRB (tahun}_t\text{)}} \times 100\%$

ii. Analisis Pengaruh *Index Financial Inclusion (IFI)*, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dana Pihak Ketiga dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 33 Provinsi Indonesia.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen.

Variabel Dependen

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian dalam suatu wilayah. Adapun PDRB yang digunakan dalam penelitian ini dengan perhitungan menggunakan pendekatan pengeluaran dan atas dasar harga konstan, dimana menurut Badan Pusat Statistik, PDRB atas dasar harga konstan dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi nyata suatu wilayah dari tahun ke tahun.

Variabel Independen

Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini yaitu *Index Financial Inclusion (IFI)*, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Metode Analisis

i. Analisis pengukuran tingkat inklusifitas keuangan pada 33 Provinsi Indonesia

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Index Financial Inclusion (IFI)* yang dirumuskan oleh Sarma (2012) dalam Sanjaya dan Nursechafia (2016). Langkah dan rumus perhitungan sebagai berikut:

Langkah pertama dalam menentukan nilai indeks inklusi setiap dimensi (d_i) menggunakan

$$d_i = w_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i}$$

rumus: ... (1)

Keterangan: W_i = *weight attached* untuk dimensi i

A_i = nilai aktual dimensi i (*actual value of dimension i*)

m_i = batas terendah nilai dimensi i

M_i = batas tertinggi nilai dimensi i

Dengan merujuk pada metode yang digunakan oleh Sanjaya dan Nursechafia (2016), penelitian ini memberikan tingkat prioritas yang sama pada ketiga dimensi, sehingga bobot nilai yang diberikan adalah $w_i = 1$ untuk seluruh i . Kemudian, nilai dimensi tunggal (*single value dimension*) akan ditempatkan pada posisi antara 0 dan w_i , selanjutnya hasil dari pengukuran dengan nilai yang mendekati w_i mengindikasikan area dengan capaian tertinggi pada seluruh dimensi. Dalam pengukuran batas bawah dan batas atas keuangan inklusif agak sulit untuk dilakukan. Sarma (2012) melakukan studi empiris untuk pengamatan batas maksimum (teratas) dan batas minimum (terendah) atas keuangan inklusif dan menyatakan bahwa terdapat kesulitan dalam pengukuran batas tersebut. Namun demikian titik M_i mewakili batas maksimum dan m_i mewakili batas bawah untuk setiap dimensi. Kemudian, akan ditentukan nilai X_1 dan X_2 . X_1 adalah jarak normalitas *Eclidean* X dari titik terendah 0, sedangkan X_2 merupakan jarak normalitas X dan titik ideal w . Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$X_1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_n^2}} \quad \dots(2)$$

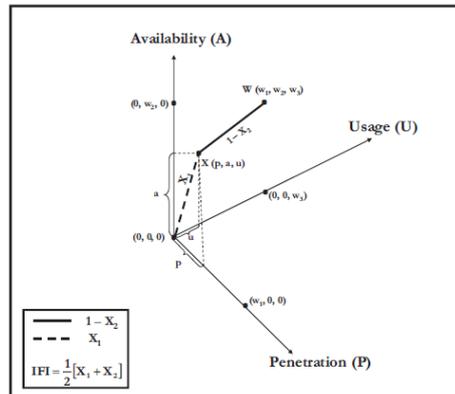
$$X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + \dots + (w_n - d_n)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_n^2}} \quad \dots(3)$$

Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai IFI yang merupakan rata-rata dari sederhana dari X_1 dan X_2 , rumus perhitungannya menjadi sebagai berikut:

$$IFI = \frac{1}{2} [X_1 + X_2] \quad \dots(4)$$

Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa nilai indeks setiap dimensi (*single value dimension*) diletakkan diantara 0 dan w_i . Nilai dimensi yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak titik ideal pada dimensi ke i . Titik $X = (d_1, d_2, d_3)$ menunjukkan tingkat inklusifitas keuangan pada masing-masing provinsi di Indonesia. Kemudian pada ruang dimensi, point $O = (0, 0, 0)$ menunjukkan situasi terburuk, dan titik $W = (w_1, w_2, w_3)$ merupakan bobot setiap dimensi yang mewakili situasi paling ideal untuk capaian inklusifitas masing-masing dimensi tersebut. Penjelasan lebih ringkas dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2 IFI 3 Dimensi: Aksesibilitas, Availibilitas dan Penggunaan Jasa Perbankan



Akhirnya, dengan pembobotan $W = (1, 1, 1)$, maka rumus IFI menjadi:

$$IFI = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{3}} + \left(1 - \frac{\sqrt{(1-d_1)^2 + (1-d_2)^2 + (1-d_3)^2}}{\sqrt{3}} \right) \right] \quad \dots(5)$$

Nilai Index Financial Inclusion (IFI) didapatkan dengan menghitung rata-rata nilai X_1 dan X_2 yang merupakan nilai yang mempresentasikan kondisi paling buruk dan posisi ideal. Sarma (2012) menyatakan bahwa pada nilai terakhir yang didapatkan dari perhitungan indeks ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: a) IFI Rendah : jika nilai IFI kurang dari 0,3, b) IFI Medium : jika nilai IFI berada diantara 0,3 dan 0,6, dan c) IFI Tinggi : jika nilai IFI berada diantara 0,6 dan 1.

ii. Analisis Pengaruh *Index Financial Inclusion (IFI)*, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dana Pihak Ketiga dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 33 Provinsi Indonesia.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis Regresi linear atau *Ordinary Least Square (OLS)* dengan data panel. Pengujian hipotesis ini menggunakan tingkat α sebesar 5%. Persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 IFI_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 DPK_{it} + \beta_4 PMDN_{it} + \beta_5 PDRBT_{it} + \mu_{it}$$
 Keterangan:

α = konstanta yang menjelaskan variasi nilai individu variabel independen

μ = nilai error

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = merupakan koefisien masing-masing variabel independent yaitu *index Financial Inclusion (IFI)*, tingkat pengangguran terbuka, dana pihak ketiga (DPK), dan PMDN.

it = menunjukkan data panel yang menggabungkan data *crosssection* dan *time series*.

Pemilihan Permodelan Terbaik

Uji Likelihood

Atau juga disebut dengan *Uji Redudant Fixed Effect Test*, pengujian ini digunakan untuk memilih permodelan terbaik antara model *Pooled* dan model *Fixed Effect*.

Hipotesis: H_0 ; model *Pooled* lebih baik; H_a ; model *Fixed Effect* lebih baik

Dasar pengambilan keputusan: 1). Jika nilai *prob chi-square* < dari $\alpha=5\%$ (0.05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima; 2). Jika nilai *prob chi-square* > dari $\alpha=5\%$ (0.05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji Hausman

Pengujian ini digunakan untuk memilih permodelan terbaik antara model *Fixed Effect* dan Model *Random Effect*.

Hipotesis: H_0 : model *Random Effect* lebih baik; H_a : Model *Fixed Effect* lebih baik

Dasar pengambilan keputusan: 1). Jika nilai *prob* < dari $\alpha=5\%$ (0.05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima; 2). Jika nilai *prob* > dari $\alpha=5\%$ (0.05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Menurut Wahyudi (2016) uji ini dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) atau faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat masing-masing variabel independen. Nilai VIF dapat dihitung dengan menggunakan rumus: $VIF = 1 / (1 - R^2)$

Apabila nilai VIF < 10 (VIF lebih kecil dari 10) maka menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Wahyudi (2016) data dengan fluktuasi yang tinggi cenderung memiliki rata-rata dan varian yang tidak konstan atau memiliki masalah heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian (*variance*) dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk menguji heteroskedastisitas adalah Uji *Glejser* (Ghozali, 2013), dimana dapat dilakukan dengan melihat nilai *prob*. dari hasil meregres nilai absolut residual terhadap variabel independent, nilai *Prob*. lebih besar dari $\alpha=5\%$ ($prob > 0,05$) maka kesimpulannya permodelan bersifat homoskedastisitas atau model regresi tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011) uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah autokorelasi. Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesa dilakukan dengan membandingkan nilai d -statistik dengan nilai dL (*durbin lower*) dan dU (*durbin upper*) yang terdapat pada table Durbin-Watson. Kesimpulan dilakukan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

$0 < d < dL$: terdapat autokorelasi positif; $dL < d < dU$: daerah ragu-ragu ; $dU < d < 4-dU$: tidak terdapat autokorelasi; $4-dU < d < d-dL$: daerah ragu-ragu; $4-dL < d < 4$: terdapat autokorelasi negatif (Wahyudi, 2016).

Uji Koefisien Determinasi (adj. R-Square)

Uji ini untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independent menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang biasa dipakai adalah nilai adjusted R square.

Uji F-Test

Pengujian ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen pada pengujian ini.

Hipotesis: $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ Yaitu seluruh variabel independent secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai variabel dependen; $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ Yaitu seluruh variabel independent secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai variabel dependen. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikansi) dari dasar pengambilan keputusan adalah sbb; 1). jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima; 2). jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji T-Test

Uji t test digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen secara individu atau parsial untuk setiap variabel.

Hipotesis: $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ Yaitu seluruh variabel independent secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai variabel dependen; $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ Yaitu seluruh variabel independent secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai variabel dependen.

Dasar Pengambilan Keputusan: Jika $prob < \alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima; Jika $prob > \alpha = 5\%$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan *Index Financial Inclusion (IFI)* di 33 Provinsi Indonesia Periode 2011-2016

Dalam perhitungan terhadap masing-masing indikator dalam Indeks Inklusi Keuangan di 33 Provinsi Indonesia pada periode penelitian 2011-2016 dilakukan dengan menggunakan metode *Index Financial Inclusion* (Sarma, 2012) dan digunakan komponen sebagai berikut:

Tabel 1 Komponen Perhitungan *Index Financial Inclusion (ifi)*

<i>DIMENSI</i>	W_i	Indikator Dimensi	m_i	M_i
<i>Aksesibilitas (d₁)</i>	1	Jumlah akun rekening perbankan/100.000 pop. dewasa	0	115517.07
<i>Availibilitas (d₂)</i>	1	Jumlah kantor cabang bank/100.000 pop. dewasa	0	4.118038
<i>Penggunaan Jasa (d₃)</i>	1	Kredit/PDRB	0	39.40996

Sumber: Diolah Sarma, 2012.

Dalam komponen perhitungan tersebut digunakan dimensi Aksesibilitas, Availibilitas dan dimensi Penggunaan Jasa yang masing-masing dimensi diberi pembobotan 1 ($W_i = 1, 1, 1$) dengan asumsi bahwa menganggap sama penting seluruh dimensi yang digunakan dan menunjukkan posisi paling ideal yang dapat dicapai oleh masing-masing dimensi. Sementara indikator yang digunakan untuk masing-masing dimensi adalah jumlah akun rekening perbankan/100.000 populasi dewasa, jumlah kantor cabang bank/100.000 populasi dewasa dan jumlah kredit bank umum/PDRB. Kemudian dalam perhitungan menggunakan IFI ini juga diperlukan batas terendah nilai dimensi i (m_i) dan batas tertinggi (M_i) untuk masing-masing dimensi. Langkah selanjutnya seluruh komponen tersebut dihitung menggunakan rumus IFI dan hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

Tabel 2 IFI 33 Provinsi Indonesia 2011-2016

<i>IFI (W = 1, 1, 1)</i>								
PROVINSI	TAHUN						RATA-RATA	Rank
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Jawa Barat	0.386	0.435	0.507	0.53	0.542	0.575	0.496	30
Banten	0.369	0.423	0.482	0.506	0.515	0.561	0.476	31
DKI Jakarta	0.999	0.999	0.999	0.999	0.999	0.999	0.999	1
D.I Yogyakarta	0.583	0.644	0.725	0.751	0.750	0.765	0.703	7

Jawa Tengah	0.396	0.444	0.524	0.557	0.572	0.618	0.519	26
Jawa Timur	0.402	0.451	0.537	0.566	0.581	0.614	0.525	25
Bengkulu	0.528	0.592	0.676	0.715	0.766	0.794	0.678	13
Jambi	0.438	0.499	0.588	0.612	0.629	0.667	0.572	19
Aceh	0.522	0.550	0.632	0.656	0.678	0.710	0.625	16
Sumatera Utara	0.579	0.646	0.716	0.742	0.754	0.771	0.701	8
Sumatera Barat	0.567	0.601	0.675	0.689	0.710	0.734	0.663	14
PROVINSI	TAHUN						RATA-RATA	Rank
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Riau	0.435	0.458	0.505	0.520	0.527	0.543	0.498	29
Kepulauan Riau	0.746	0.772	0.796	0.795	0.797	0.798	0.784	4
Sumatera Selatan	0.363	0.466	0.548	0.553	0.566	0.594	0.515	27
Bangka Belitung	0.454	0.466	0.549	0.585	0.591	0.655	0.550	22
Lampung	0.295	0.346	0.401	0.411	0.427	0.450	0.388	33
Kalimantan Selatan	0.578	0.643	0.731	0.742	0.766	0.795	0.709	6
Kalimantan Barat	0.606	0.558	0.650	0.680	0.703	0.747	0.657	15
Kalimantan Timur	0.655	0.689	0.728	0.729	0.732	0.747	0.713	5
Kalimantan Tengah	0.515	0.569	0.619	0.610	0.607	0.640	0.593	18
Sulawesi Tengah	0.449	0.479	0.562	0.588	0.595	0.618	0.548	24
Sulawesi Selatan	0.590	0.642	0.694	0.715	0.737	0.769	0.691	11
Sulawesi Utara	0.682	0.738	0.823	0.851	0.842	0.889	0.804	2
Sulawesi Tenggara	0.273	0.487	0.597	0.619	0.650	0.673	0.550	23
Sulawesi Barat	0.466	0.403	0.452	0.454	0.463	0.509	0.458	32
Gorontalo	0.750	0.582	0.675	0.694	0.709	0.743	0.692	10
Nusa Tenggara Barat	0.370	0.429	0.514	0.563	0.569	0.632	0.513	28
Bali	0.663	0.738	0.818	0.830	0.839	0.877	0.794	3
Nusa Tenggara Timur	0.434	0.487	0.575	0.595	0.629	0.661	0.564	20
Maluku	0.597	0.603	0.680	0.716	0.739	0.761	0.683	12
Papua	0.463	0.517	0.582	0.588	0.602	0.626	0.563	21
Maluku Utara	0.443	0.540	0.627	0.665	0.69	0.709	0.612	17
Papua Barat	0.586	0.651	0.725	0.740	0.727	0.756	0.697	9
Rata-Rata	0.521	0.562	0.634	0.654	0.667	0.697	0.622	

Sumber: Data diolah, 2018.

Pola tingkat inklusi keuangan selama periode 2011 hingga 2016, provinsi yang dikategorikan sebagai Provinsi dengan nilai IFI tinggi yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, D.I Yogyakarta, Sumatera Utara, Papua Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Aceh, lalu Maluku Utara. Sedangkan Provinsi dengan nilai IFI sedang atau medium adalah Kalimantan Tengah, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Papua, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Riau, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Barat, dan yang terakhir Lampung. Sedangkan untuk Provinsi yang dikategorikan sebagai Provinsi dengan nilai IFI rendah di Indonesia tidak ditemukan dalam perhitungan selama periode penelitian. Sebagaimana yang diperoleh dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 yang dilakukan oleh OJK, meskipun dengan menggunakan metode pengukuran yang berbeda, namun menunjukkan hasil yang hampir sama. Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki nilai indeks inklusi keuangan yang terkategori tinggi, sedangkan provinsi yang

dikategorikan dalam indeks inklusi keuangan sedang hanya provinsi Kalimantan Selatan (59,27%) dan Papua Barat (58,55%) serta tidak ditemukan pula provinsi dengan indeks inklusi keuangan rendah seperti halnya dalam penelitian ini.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IFI dalam seluruh 33 provinsi Indonesia adalah sebesar 0,62278 dan dikategorikan kedalam IFI tinggi. Hasil tersebut senada dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 yang dilakukan oleh OJK, hasil survei ini menemukan hasil bahwa indeks inklusi keuangan pada tahun 2016 adalah sebesar 67,82% yang tergolong dalam IFI tinggi.

Pengaruh Inklusi keuangan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap PDRB di 33 Provinsi Indonesia periode 2011-2016

Pengujian Pemilihan Permodelan

Penelitian ini menggunakan analisis regresi pada data panel yang memiliki tiga model, yaitu: *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Uji pemilihan permodelan dalam penelitian ini menggunakan *Redudant Fixed Effect Test* dan *Hausman Test* dengan bantuan alat statistik *Eviews 9*, sehingga memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Pengujian Pemilihan Permodelan Terbaik

<i>Redudant Fixed Effect Test</i>		
Cross-section Chi-square Statistic	P value	Hasil
591.658793	0.0000	Fixed Effect
<i>Hausman Test</i>		
Cross-section random Chi-square Statistic	P value	Hasil
223.741819	0.0000	Fixed Effect

Sumber: Data diolah, 2018.

Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa permodelan regresi yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2011). Permodelan regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Adapun hasil uji Multikolinearitas dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yakni sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

VARIABEL	R ²	VIF 1/(1-R ²)
IFI	0.810471	5.2762374
TPT	0.854623	6.8786672
DPK	0.971620	35.236082
INVESTASI	0.837280	6.1455261

Sumber: Data diolah, 2018.

Hasil perhitungan nilai VIF pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel IFI, TPT, dan PMDN memiliki nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut terbebas dari masalah asumsi klasik Multikolinearitas. Namun, pada tabel tersebut dapat dilihat pula bahwa nilai VIF yang dimiliki oleh variabel DPK adalah sebesar 35.236, nilai tersebut lebih dari 10 ($35.236 > 10$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DPK terindikasi Multikolinearitas. Dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa diprediksi terdapat multikolinearitas dalam permodelan yang digunakan dalam penelitian ini. Namun, menurut Gujarati (2004) masalah multikolinearitas dalam permodelan telah teratasi dengan panel data yang digunakan. Sehingga masalah multikolinearitas dalam penelitian ini dapat diabaikan.

Uji Autokorelasi

Pengujian untuk mendeteksi adanya gejala Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Adapun cara pendeteksian menggunakan *DW Test* dalam model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

$\alpha=5\%$	n	k	Durbin-Watson
	198	4	2.399679

Sumber: Data diolah, 2018.

Dari tabel hasil regresi diatas, dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 0.05 ($\alpha=5\%$), jumlah sampel yang digunakan sebanyak 198 serta jumlah variabel independent sebanyak 4 variabel, didapatkan nilai Durbin Watson (DW Statistik) dari hasil analisis regresi sebesar 2.399679. Kemudian dengan melihat tabel Durbin Watson, maka nilai Durbin Watson tersebut berada pada interval 2.274 sampai dengan 4 ($2.274 < 2.399679 < 4$). sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini mengandung Autokorelasi negatif. Sehingga kemudian dilakukan perbaikan Autokorelasi dengan menambahkan variabel *Autoregressive* (AR) ke dalam model pengujian. *Autoregressive* merupakan variabel kelambanan dari variabel terikat yang diletakkan pada komponen variabel bebas. Perbaikan menggunakan metode ini yaitu dengan menambahkan variabel: $Y_{t-1} = Y_t - Y_t(-1)$ (Wahyudi, 2016).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam permodelan terjadi penyimpangan yang disebabkan oleh varian gangguan berbeda antara satu observasi terhadap observasi lain. Untuk mendeteksi adanya gejala Heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan *Glejser test* dengan menggunakan bantuan alat statistik *Eviews 9.0*, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
IFI	-12227283	-0.883746	0.3785
TPT	119385.4	0.143419	0.8862
DPK	-3.76E-08	-2.946501	0.0038
PMDN	7.04E-07	2.817400	0.0056
C	18926329	1.909434	0.0584

Sumber: Data diolah, 2018.

Uji ini dilakukan dengan melihat hasil regresi nilai residual absolut dari masing-masing persamaan dengan variabel independent, kemudian dilihat signifikansi dari masing-masing nilai probabilitas. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat bahwa variabel IFI dan TPT tidak signifikan maka dapat disimpulkan bahwa variabel bersifat homoskedastisitas. Namun Variabel DPK dan PMDN signifikan berpengaruh terhadap nilai residual absolut tersebut secara parsial, maka permodelan terindikasi memiliki masalah heteroskedastisitas. Menurut Wahyudi (2016), perbaikan masalah heteroskedastisitas pada model tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan *White Heteroscedasticity Consistent Coefficient Covariance* atau disebut metode *White HC*. Metode ini dilakukan dengan melakukan pengoreksian terhadap standar *error* dari koefisien regresi. Sehingga kemudian permodelan dalam penelitian ini bebas dari masalah Heteroskedastisitas.

Hasil Estimasi Regresi Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4.7: Hasil Estimasi Regresi Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

HASIL ESTIMASI REGRESI		PDRB	
<i>VARIABEL INDEPENDEN</i>		Coefficient	p-value
	C	1.07E+08	0.0000
X1	IFI	1.05E+08	0.0001
X2	TPT	1068049.	0.3752
X3	DPK	3.78E-07	0.0000
X4	PMDN	5.46E-06	0.0000
X5	PDRBT	0.483058	0.0337
<i>R²</i>		0.917589	
<i>Adj. R²</i>		0.916886	
<i>F-stat</i>		1420.121	
<i>Prob (F-stat)</i>		0.000000	
<i>Mean dependent var</i>		2.59E+08	
<i>S.D. dependent var</i>		3.60E+08	
<i>Akaike info criterion</i>		36.66671	
<i>Schwarz criterion</i>		37.38202	
<i>Durbin-Watson stat</i>		1.905362	

Sumber: Data diolah, 2018.

Dari hasil estimasi yang telah dilakukan didapatkan model persamaan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = 1.07\text{E}+08 + 1.05\text{E}+08 \text{IFI} + 1068049 \text{TPT} + 3.78\text{E}-07 \text{DPK} + 5.46\text{E}-06 \text{PMDN} + 0.483058 \text{PDRBT}$$

Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) dari model persamaan regresi di atas adalah 91,76% dan nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (adj. R^2) adalah 91,69%. Nilai adj. R^2 sebesar 91,69% tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini (IFI, TPT, DPK dan PMDN) dapat menjelaskan variabel dependen (PDRB) sebesar 91,69%, sedangkan sisanya 8.31% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak termasuk dalam model pengujian penelitian ini. Dalam pengujian ini digunakan data panel sebagaimana Ekananda (2016), penggunaan data panel dapat diestimasi karakteristik masing-masing wilayah dengan memperhatikan adanya dinamika antar waktu dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. sehingga penggunaan data panel ini dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan mencakup hal-hal yang lebih mendekati realita pada masing-masing provinsi di Indonesia.

Uji F Test

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen dalam penelitian secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (signifikansi) dari hasil yang diperoleh. Dari hasil estimasi permodelan di atas didapatkan nilai *prob(F-statistic)* sebesar 0.000000 yang berarti lebih kecil dari $\alpha=5\%$ (0.05). dapat diambil keputusan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk pengujian tersebut adalah bahwa seluruh variabel independen (IFI, TPT, DPK, dan PMDN) secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (PDRB).

Uji T Test

Uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen dalam pengujian terhadap variabel dependen secara parsial atau individu. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (signifikansi) dari masing-masing variabel terhadap $\alpha=5\%$ (0.05). Dalam pengujian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Nilai probabilitas t-statistik untuk variabel IFI adalah sebesar $0.0001 < \alpha = 0.05$. maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga variabel IFI berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Kemudian nilai probabilitas t-statistik untuk variabel TPT adalah sebesar $0.3752 > \alpha = 0.05$. maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga variabel TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Sedangkan, nilai probabilitas t-statistik untuk variabel DPK adalah sebesar $0.0000 < \alpha = 0.05$. maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Selanjutnya nilai probabilitas t-statistik untuk variabel PMDN adalah sebesar $0.0000 < \alpha = 0.05$. maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga variabel PMDN berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Dan nilai probabilitas t-statistik untuk variabel PDRBT adalah sebesar $0.0337 < \alpha = 0.05$. maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Artinya nilai PDRB pada masa penelitian dipengaruhi juga oleh nilai PDRB pada periode sebelum penelitian.

Indeks Inklusi Keuangan di 33 Provinsi Indonesia

Dewasa ini, prioritas inklusifitas keuangan menjadi sebuah agenda utama dalam berbagai lembaga internasional secara global, khususnya pada negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Program ini disinyalir dapat menjadi strategi yang tepat dalam mengentaskan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan antar masyarakat dalam berbagai negara. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung beragam upaya lembaga jasa keuangan seperti perkembangan hingga intensifitas aneka produk serta jasa yang disediakan oleh lembaga keuangan yang diharapkan akan memperluas peluang sama rata bagi seluruh masyarakat dalam mengakses perbankan. Menurut OJK, langkah ini didasari dengan kesadaran bahwa program inklusi keuangan sangat dibutuhkan oleh Indonesia mengingat masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal diakibatkan adanya *financial barrier* dari sektor perbankan dan masyarakat. Berbagai literatur mengungkapkan bahwa masyarakat seringkali tidak menggunakan jasa-jasa lembaga keuangan dengan baik, walaupun masyarakat memiliki akses terhadap jasa keuangan tersebut (Sarma, 2012).

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat dilihat secara umum bahwa *trend* rata-rata inklusi keuangan tahunan pada periode 2011 hingga 2016 ini menunjukkan peningkatan setiap tahunnya meskipun agak lambat. Seperti yang terlihat pada gambar grafik berikut ini:

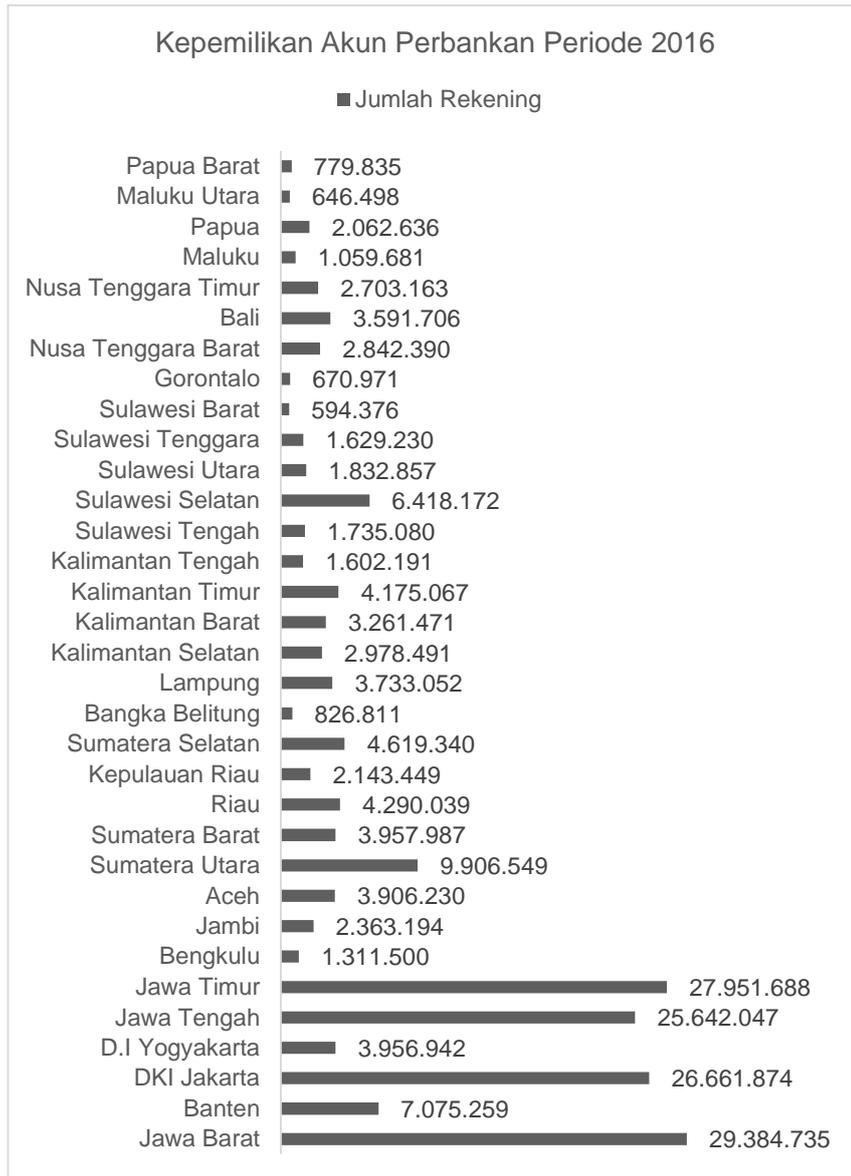
Gambar 3 Rata-Rata IFI Tahunan Di 33 Provinsi Indonesia 2011-2016



Sumber: Data diolah, 2018.

Gambar diatas menunjukkan rata-rata IFI di 33 Provinsi Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni dari 0.5212 (*Middle Financial Inclusion*) pada tahun 2011 meningkat menjadi 0.69746 (*High Financial Inclusion*) pada tahun 2016. Hasil ini juga senada dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 yang dilakukan oleh OJK, hasil survei ini menemukan hasil bahwa indeks inklusi keuangan pada tahun 2013 hingga tahun 2016 adalah sebesar 59,74% (2013) dan 67,82% (2016), hasil tersebut menunjukkan tren inklusi keuangan mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan maupun yang sedang berlangsung hingga sekarang berdampak positif terhadap arah peningkatan sektor keuangan yang inklusif. Sedangkan, berdasarkan analisis masing-masing dimensi yang digunakan dalam penelitian ini, didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut: Yang pertama, dimensi Aksesibilitas, dari pengujian dalam penelitian yang dilakukan selama periode 2011 - 2016 terjadi peningkatan jumlah rekening di perbankan pada seluruh provinsi, hal ini dapat disebabkan pengguna jasa perbankan yang semakin meningkat maupun ada indikasi bahwa individu yang awalnya hanya memiliki satu rekening kemudian memiliki beberapa rekening perbankan. Berikut merupakan gambar grafik kepemilikan akun pada perbankan di seluruh wilayah Indonesia pada periode 2016.

Gambar 4 Kepemilikan Akun Perbankan Periode 2016

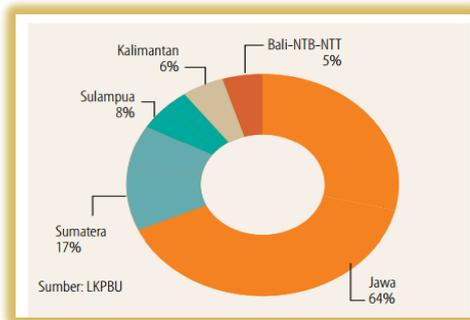


Sumber: Data diolah Bank Indonesia, 2016.

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa penetrasi perbankan di Provinsi Pulau Jawa tergolong dalam kategori tinggi hal tersebut terindikasikan dari jumlah kepemilikan akun rekening masyarakat dewasa pada lembaga perbankan. Namun, setelah dibagi dengan jumlah populasi dewasa yang ada pada masing-masing provinsi, nilai dimensinya menjadi kecil. Hal ini dapat terjadi dikarenakan jumlah populasi dewasa pada pulau tersebut yang sangat besar, yakni lebih dari rata-rata 25 juta jiwa.

Selanjutnya untuk dimensi availibilitas digunakan indikator jumlah kantor cabang bank terhadap populasi dewasa pada wilayah terkait, sebagaimana digunakan asumsi bahwa semakin banyak dan semakin luas penyebaran kantor cabang maka akan meningkatkan layanan jasa perbankan yang disediakan kepada masyarakat. Namun, jumlah kantor cabang saja tidak cukup menggambarkan luas penyebaran layanan perbankan, oleh karena itu dibagi dengan jumlah populasi guna mengetahui berapa banyak individu yang dijangkau oleh layanan perbankan.

Gambar 5 Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah Indonesia Tahun 2016 Tw I

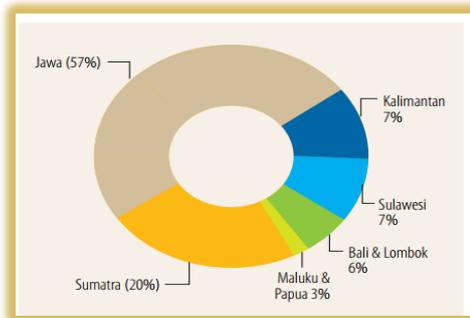


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2016.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa secara umum persebaran layanan jasa keuangan masih terdapat indikasi hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu yakni pada Pulau Jawa pertama kemudian pada Pulau Sumatera. Salah satu penyebabnya adalah Pulau Jawa sangat erat dengan pusat kegiatan ekonomi, sehingga seluruh bank umum konvensional yang ada di Indonesia pasti memiliki kantor cabang yang tersebar diseluruh pulau Jawa dan umumnya masih jarang terdapat bank asing yang memiliki cabang di luar Pulau Jawa. Hasil penelitian selama periode 2011-2016 menunjukkan terjadi peningkatan pada dimensi avaiibilitas pada hampir seluruh provinsi di Indonesia. Artinya, perbankan mulai aktif dalam melakukan perbaikan infrastuktur yang menunjang jalannya aktivitas keuangan. Namun meskipun pada grafik menunjukkan dimensi avaiibilitas sangat tinggi atau ada kecenderungan terkonsentrasi pada Pulau Jawa, indeks avaiibilitas pada provinsi di Pulau Jawa tergolong pada indeks medium cenderung rendah. Hal ini tentu disebabkan oleh kondisi demografis Provinsi pada Pulau Jawa yang memiliki jumlah populasi dewasa sangat tinggi melebihi provinsi pada pulau lainnya, seperti yang terjadi pada dimensi aksesibilitas.

Sedangkan dimensi Penggunaan Jasa Lembaga Keuangan digunakan sebagai dampak atas adanya anggapan bahwa kepemilikan akun saja tidak cukup menggambarkan inklusifitas sistem keuangan karena pada banyak kasus masyarakat hanya memiliki akun pada perbankan namun tidak memanfaatkan jasa yang disediakan. Dalam hal ini digunakan indikator jumlah kredit terhadap PDRB. Persebaran penyaluran kredit pada perbankan di wilayah Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 6 Penyebaran Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Wilayah di Indonesia Periode 2016

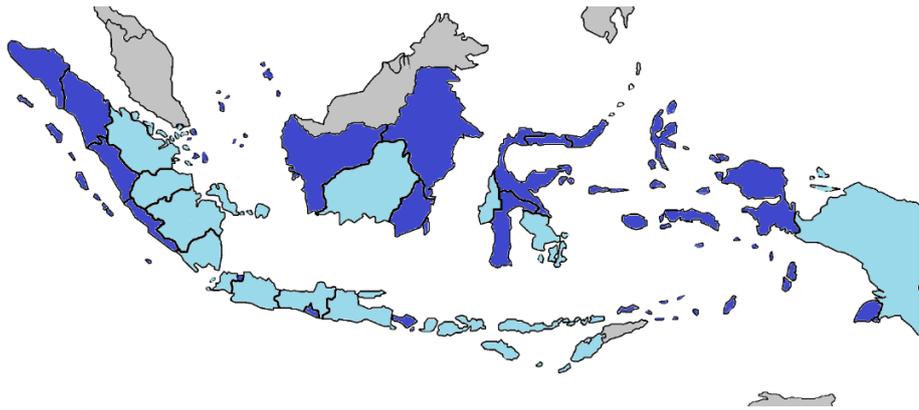


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2016.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penyaluran kredit terbesar terdapat pada provinsi di Pulau Jawa. Tingginya penyaluran kredit ini, memberikan sumbangan terbesar pada nilai indeks masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena di Pulau Jawa terdapat banyak wilayah pusat perkantoran dan perusahaan maupun UMKM yang membutuhkan dana produktif sehingga kemudian menimbulkan volume transaksi di perbankan juga sangat tinggi. Dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa, provinsi yang terdapat di Bali dan Lombok maupun di Maluku dan Papua memiliki volume penyaluran kredit jauh lebih sedikit. Namun dikarenakan PDRB yang kecil juga, nilai indeks penggunaan jasa perbankan pada wilayah tersebut menjadi tinggi.

Adapun Pemetaan mengenai persebaran hasil perhitungan IFI seluruh wilayah di Indonesia dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 7 Persebaran IFI di 33 Provinsi Indonesia Tahun Rata-Rata 2011-2016



Sumber: Gambar diolah Peta Buta Indonesia, 2010.

Gambar 7 menunjukkan persebaran IFI di Provinsi-Provinsi di Indonesia yang dibedakan menurut *gradient* warna – Biru Tua (menunjukkan IFI tinggi), Biru Muda (IFI sedang/medium), dan Putih (IFI rendah). Hasil ini mengindikasikan bahwa Indonesia melalui lembaga keuangan formal telah berupaya sebaik mungkin untuk melakukan berbagai upaya guna meningkatkan inklusifitas keuangan masing-masing wilayah dan mencapai *goal* SNKI sehingga memberikan hasil kinerja keuangan yang sangat baik yang dapat tercermin dari tingkat indeks inklusi keuangan namun juga tetap memiliki potensi untuk lebih ditingkatkan kembali. Ekspansi pada sektor jasa keuangan dalam periode penelitian semakin meluas dan pihak perbankan semakin kompetitif dalam melakukan inovasi terhadap produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah sehingga membuat akses perbankan yang berdasar masing-masing wilayah serta kondisi geografis yang berbeda menjadi semakin terarah kepada penjangkauan masyarakat pada seluruh lapisan sehingga *benefit* yang dapat diterima dari adanya lembaga jasa keuangan formal tidak hanya dapat diterima oleh sekelompok orang tertentu saja.

Pola persebaran tingkat inklusi keuangan memberikan indikasi bahwa tingkat inklusi keuangan tertinggi berada pada provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut sangat lumrah dikarenakan Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota negara dan merupakan provinsi megapolitan dengan tingkat aktivitas keuangan dan perekonomian yang tinggi dibanding provinsi lainnya hingga penyaluran kredit pada provinsi ini mencapai 2x lipat dari nilai PDRB Provinsi itu sendiri. Selain itu data menunjukkan bahwa seluruh bank di Indonesia pasti memiliki layanan di Provinsi DKI Jakarta. Alasan lainnya datang dari sisi masyarakat pada Provinsi DKI Jakarta yang diindikasikan bahwa hampir seluruh masyarakat dewasa memiliki setidaknya satu rekening perbankan. Selanjutnya provinsi dengan nilai IFI tertinggi kedua yaitu Provinsi Sulawesi Utara, hal ini disebabkan karena Provinsi ini terkenal dengan Provinsi yang memiliki kekayaan alam berupa sumber pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, selain itu provinsi ini terkenal dengan potensi pertambangan tembaga dan Emas serta perak di beberapa wilayahnya, sehingga hal tersebut menimbulkan aktivitas ekonomi yang tinggi. Provinsi selanjutnya terkategori IFI tinggi adalah Bali selain itu DI Yogyakarta, hal ini dikarenakan kedua Provinsi tersebut merupakan provinsi yang dikenal sebagai pusat pariwisata yang tentunya juga sering dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun internasional sehingga dibutuhkan layanan keuangan yang cepat dan aktif. Sektor pariwisata juga menimbulkan dorongan terhadap aktivitas ekonomi yang tinggi dan meningkatkan tingkat inklusifitas keuangan serta menyokong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sektor keuangan yang stabil dan bergerak sangat cepat. Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat juga memiliki tingkat inklusifitas keuangan yang termasuk tinggi, hal ini dikarenakan karakteristik demografis masing-masing wilayah tersebut, dimana penduduk dewasa cenderung masih sedikit sehingga memberikan hasil inklusi yang tinggi. Alasan lainnya juga disebabkan karena pada wilayah-wilayah tersebut layanan keuangan masih sangat terbatas sehingga masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dalam mengakses layanan keuangan. Selanjutnya Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Jawa Timur yang terdapat pada Pulau Jawa tergolong dalam tingkat inklusi keuangan medium atau sedang. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah kepemilikan akun perbankan, jumlah kantor cabang dan penyaluran kredit masih belum sebanding dengan kondisi demografis provinsi-provinsi tersebut, ada indikasi bahwa meskipun layanan perbankan di Pulau Jawa sangat tinggi namun belum dapat menjangkau lapisan masyarakat secara merata. kondisi ini tercerminkan dari tingkat kemiskinan di Pulau Jawa yang juga sangat tinggi yakni mencapai hingga 53% dari seluruh populasi masyarakat miskin di

Indonesia. Alasan utamanya disebabkan masyarakat yang terdapat pada Pulau Jawa memiliki banyak pilihan jasa keuangan selain bank umum konvensional sejalan dengan yang disampaikan Ummah (2015). Selain itu, ada indikasi sektor perbankan masih cenderung terkonsentrasi dalam penyaluran produk keuangannya (*product barrier*). Sejalan dengan hasil Bank Indonesia (2014) yang melakukan *Banking Research* yang menemukan hasil bahwa dominasi sektor perbankan dalam menjalankan sistem keuangan nasional masing terkonsentrasi penyaluran produk keuangannya hanya pada beberapa segmen atau kalangan masyarakat tertentu. Namun secara umum, rata-rata tingkat inklusi keuangan provinsi dalam Pulau Jawa masih tergolong tinggi hanya Provinsi Banten dan Jawa Barat yang dibawah 50%.

Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan pada 33 provinsi di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dan berkorelasi positif terhadap PDRB di masing-masing provinsi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan yang terjadi pada indeks inklusi keuangan akan direspon dengan peningkatan pula terhadap tingkat PDRB di masing-masing provinsi tersebut. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa pada umumnya provinsi yang memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi akan cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tinggi. Misalnya pada provinsi DKI Jakarta yang memiliki rata-rata indeks inklusi keuangan pada periode penelitian yang sangat tinggi (0.999) memiliki tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi atau PDRB yang sangat tinggi, sedangkan provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki rata-rata indeks inklusi keuangan pada periode penelitian sedang (0.5937) memiliki tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cenderung sedang pula dan mendekati rata-rata. Namun pada beberapa kasus pada beberapa wilayah tertentu, tingkat inklusifitas keuangan yang tinggi tidak secara langsung memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Seperti yang terjadi pada Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua barat. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, persyaratan yang ketat, proses yang sangat kompleks dan formalitas yang masih terlalu tinggi (Bank Indonesia, 2014). Sehingga tingkat inklusifitas yang tinggi tidak mampu dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga.

Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pengangguran terbuka pada 33 provinsi di Indonesia memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan berkorelasi positif terhadap PDRB di masing-masing provinsi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara umum peningkatan yang terjadi pada tingkat pengangguran terbuka tidak direspon dengan peningkatan pula terhadap tingkat PDRB.

Hasil ini dapat mencerminkan dampak dari kemajuan zaman dan industri padat modal yang ditandai dengan semakin modern dan canggihnya alat-alat yang digunakan dalam kegiatan produksi yang menghasilkan output dalam perekonomian. Penggunaan teknologi dan mesin yang lebih modern, efektif dan efisien memungkinkan industri-industri dewasa ini untuk tetap memproduksi output dalam jumlah yang sama atau lebih besar meskipun dengan menggunakan tenaga kerja dalam jumlah yang sedikit. Sehingga kemudian jumlah pengangguran tidak berdampak secara langsung terhadap output nasional. Seperti halnya yang disampaikan oleh Martin Prachowny (1993) dalam *Okun's Law*, bahwa sebagian besar dari perubahan (kenaikan maupun penurunan) output yang dihasilkan sebenarnya dipengaruhi oleh faktor lain selain pengangguran, misalnya seperti pemanfaatan kapasitas produksi dan jumlah jam kerja yang dapat ditempuh. Lebih lanjut, Prachowny memberikan hasil penelitiannya bahwa faktor-faktor lain tersebut mengurangi hubungan antara pengangguran dan GDP sebanyak 0.7% setiap terjadinya perubahan 1% dalam tingkat pengangguran.

Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Pihak Ketiga pada 33 provinsi di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dan berkorelasi positif terhadap PDRB di masing-masing provinsi. Hal tersebut mengindikasikan peningkatan yang terjadi pada dana pihak ketiga akan direspon dengan peningkatan pula terhadap tingkat PDRB di masing-masing provinsi tersebut. Dengan kata lain bahwa terdapat hubungan antara tingkat tabungan saat ini dengan tingkat pendapatan pada masa yang akan datang yang dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tingkat tabungan masyarakat saat ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi pada periode penelitian, hal ini dapat mengindikasikan perbankan Indonesia selama periode penelitian ini memberikan kinerja yang sangat baik,

penyaluran serta pinjaman bank tergolong kuat dan bank dapat menjalankan peran intermediasinya dengan sangat aktif, dana simpanan di perbankan terserap dengan baik untuk dijadikan modal bagi para investor dalam melakukan kegiatan produktif guna memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan output nasional.

Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penanaman Modal Dalam Negeri pada 33 provinsi di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dan berkorelasi positif terhadap PDRB di masing-masing provinsi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan yang terjadi pada PMDN akan memicu kenaikan pada pertumbuhan ekonomi hal ini karena kenaikan PMDN akan memberikan dampak pada kenaikan produksi barang dan jasa dalam perekonomian melalui peningkatan modal atau *capital* sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya penurunan PMDN juga akan mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari turunnya produksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Hasil ini didukung oleh teori Samuelson dan Nourdous (2004), yang menyatakan bahwa investasi merupakan faktor penunjang penting dalam membangun perekonomian karena merupakan dasar dari proses produksi.

Pertumbuhan Ekonomi Periode Sebelum dan Pertumbuhan Ekonomi Periode Penelitian

Hasil estimasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berkesinambungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pengaruh yang ditunjukkan adalah signifikan dan berkorelasi positif hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi pada masa lalu pada umumnya akan memicu kenaikan pada pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang, dan sebaliknya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Amri (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tahun tertentu secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi pada periode tahun sebelumnya.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum, tingkat inklusi keuangan pada 33 provinsi di Indonesia selama periode penelitian mengalami *trend* yang meningkat setiap tahunnya dan tergolong dalam *High Financial Inclusion*. Hasil ini mengindikasikan bahwa Indonesia menunjukkan peran aktif serta hasil kinerja yang sangat baik melalui lembaga keuangan formal dalam mencapai *goal* Inklusi keuangan. Dalam perhitungan tingkat inklusi keuangan, faktor kondisi demografis antar wilayah merupakan salah satu faktor terpenting yang sangat mempengaruhi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan, dana pihak ketiga dan penanaman modal dalam negeri memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh provinsi di Indonesia. Namun pada kasus tertentu, tingkat inklusifitas yang tinggi tidak dapat secara optimal dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya hambatan seperti kondisi geografis antar wilayah dan lain sebagainya. Sementara tingkat pengangguran terbuka tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan faktor tenaga kerja yang semakin tergantikan dengan alat-alat produksi yang semakin modern, efektif dan efisien.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas mengenai pengaruh tingkat inklusi keuangan, tingkat pengangguran terbuka, dana pihak ketiga dan penanaman modal dalam negeri periode 2011-2016, maka terdapat beberapa saran yaitu :

1. Bagi para pemangku kebijakan untuk terus mendorong inklusifitas keuangan secara merata pada seluruh provinsi di Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan sektor keuangan formal misalnya dengan melakukan perbaikan infrastruktur dan pemerataan produk layanan keuangan khususnya pada penetrasi geografis yang dapat dijangkau guna memberikan peluang yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat serta dalam upaya pengoptimalan kontribusi inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat inklusifitas yang stabil juga akan berdampak baik pada perbankan dalam melakukan peran intermediasinya sehingga akan memberikan peluang pada munculnya investor-investor baru.
2. Kemudian berkaitan dengan upaya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata, perlu dilakukan beberapa upaya misalnya melalui upaya peningkatan penanaman modal dalam negeri sehingga tidak hanya terkonsentrasi pada satu daerah tertentu dan dapat membuka peluang baru terhadap muncul dan berkembangnya industri baru pada masing-

masing wilayah. Pada akhirnya mencapai pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang yang stabil dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan lainnya seperti kesenjangan antar wilayah dan kemiskinan secara menyeluruh.

3. Bagi penelitian selanjutnya dengan menggunakan perhitungan dengan metode *Index Financial Inclusion* dapat memberikan perhatian khusus pada beberapa hal berikut. Penggunaan data kepemilikan akun menyebabkan perhitungan dimensi aksesibilitas menjadi bias dikarenakan setiap individu dapat memiliki jumlah rekening lebih dari 1 akun, kemudian untuk memitigasi risiko terjadinya bias, lebih tepat dengan menggunakan jumlah individu yang memiliki akses terhadap perbankan sebagai indikator dibandingkan menggunakan jumlah akun yang dimilikinya. Selain itu, penggunaan data-data makro dalam perhitungan yang digunakan sebagai indikator menunjukkan bahwa hasil perhitungan masih kurang mampu menjelaskan keadaan perekonomian yang sebenarnya pada wilayah Indonesia. Oleh karena itu selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan data mikro atau melakukan survei langsung untuk memperoleh keakuratan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Khairul. 2017. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi Vol. 1 Ed.1*.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Pengeluaran, 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dalam Angka* <http://www.bps.go.id/>. Diakses pada 11 Januari 2018 pukul 10.15.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 1986-2017 Dalam Angka* <http://www.bps.go.id/>. Diakses pada 11 Januari 2018 pukul 10.25.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (Milyar Rupiah) 2006-2016 Dalam Angka* <http://www.bps.go.id/>. Diakses pada 11 Januari 2018 pukul 10.35.
- Bank Indonesia. 2014. Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif. *Booklet Keuangan Inklusif*. Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.
- Beck, et. al. 2007. Finance, Inequality and the Poor. *Journal of Economic Growth, Vol.12*.
- Ekananda, M. 2016. Analisis Ekonometrika Data Panel (Kedua). Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2004. *Basic Econometrics (Ekonometrika Dasar)*, Terjemahan Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
- Keynes. 1936. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Electronic Texts Collection The University of Adelaide Library.
- Leyshon, A and Thrift, N. 1995. Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States. *JSTOR, New Series Vol. 3 No. 3*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*.
- Prachowny, Martin F J. 1993. Okun's Law: Theoretical Foundations and Revised Estimates. *The Review of Economics and Statistics, MIT Press Vol. 75 Ed. 2*.

- Samuelson, Paul and William Nordhaus. 2004. *Economics 18th Ed.* The McGraw-Hill series economics.
- Sanjaya, I Made dan Nursechafia. 2016. Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 18. No 3.*
- Sarma. 2008. Index of Financial Inclusion. *ICRIER Working Paper 2015.*
- Sarma, M dan J. Pais. 2008. Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis. *Paper Presented at the Conference of Equality, Inclusion, and Human Development.* New Delhi: HDCA and IHD.
- Sarma, M. 2012. Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness. *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, No 7.*
- Subana, M dan Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah.* Bandung: Pustaka Setia.
- Sutawijaya, Adrian. 2010. Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1980-2006. *Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol.6 Ed.1. Hal:14-27.*
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 1,* Alih bahasa Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi ke 9.* Jakarta : Erlangga.
- Umar, Azwar Iskandar. 2017. Index of Syariah Financial Inclusion In Indonesia. *Buletin Ekonomi dan Perbankan, Vol. 20, No.1.*
- Ummah, Bintan Badriatul. 2013. *Analisis Keterkaitan Keuangan Inklusif dengan Pembangunan di Asia (Skripsi).* Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Wahyudi, Setyo Tri. 2016. *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan Eviews.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.